

SKRIPSI

**DETERMINASI KEPATUHAN UMKM MELALUI DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PERSPEKTIF KeadILAN, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI WAYAN ASRI YUNI SWARI
NIM : 1915644037**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

DETERMINASI KEPATUHAN UMKM MELALUI DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, PERSPEKTIF KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS

Ni Wayan Asri Yuni Swari

1915644037

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak menjadi pilar penerimaan negara. Namun, rasio penerimaan pajak Indonesia belum ideal disandingkan dengan OECD. Sehingga, diperlukan kesadaran bagi wajib pajak untuk taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal ataupun eksternal. Penelitian ini berupaya untuk mendeterminasi kepatuhan pajak UMKM melalui faktor digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode pengambilan sampel *purposive random sampling*. Dengan menerapkan formula *slovin*, sampel yang digunakan berjumlah 100 orang pelaku UMKM dan telah mengisi kuesioner penelitian di *google form*. Sebelumnya, kuesioner yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas disebar melalui sosial media selama 30 hari pengamatan. Data yang diperoleh direkapitulasi untuk dilakukan analisis deskriptif dan analisis statistik menggunakan program statistik SmartPLS versi 4.0.

Hasil pengujian mencerminkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Hasil penelitian dapat dikonfirmasi dengan *Slippery Slope Framework* yang terbentuk dari 2 (dua) unsur, yakni peran kuasa (*power*) dan kepercayaan (*trust*). Peran kuasa otoritas pajak tercermin dalam kebijakan untuk menyediakan sistem pelayanan berbasis digital (*e-system*). Transformasi *e-system* menghadirkan layanan tanpa batas sehingga mampu menggerakkan niat wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi yang dapat dijelaskan dengan *Technology of Acceptance Model Theory*. Penerimaan teknologi terjadi ketika teknologi memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak. Peran kuasa dalam *Slippery Slope Framework* dapat seimbang atau memberikan kontribusi kepatuhan apabila diikuti dengan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hal ini dijelaskan oleh *Fairness Heuristic Theory*. Kepercayaan terbangun apabila kebijakan bersifat adil. Kebijakan yang adil semakin memperkuat legitimasi otoritas pajak yang kemudian mendorong kepatuhan UMKM. Hal ini didukung oleh *Legitimacy Theory*. Penelitian ini ke depannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan *e-system* bagi UMKM yang belum menggunakan. Kemudian, penelitian ini bermanfaat menjadi bahan evaluasi dari upaya reformasi yang telah dilaksanakan oleh otoritas pajak.

Kata kunci: digitalisasi, keadilan, kepercayaan, kesadaran, kepatuhan pajak

**THE DETERMINATION OF MSME'S COMPLIANCE THROUGH
DIGITALIZATION TAX SYSTEM, FAIRNESS PERSPECTIVE,
AND TRUST IN AUTHORITY**

**Ni Wayan Asri Yuni Swari
1915644037**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes are the foundation of state revenue. However, Indonesia's tax revenue ratio is not ideal compared to the OECD. Therefore, awareness is needed for taxpayers to obey their tax obligations. The intention of taxpayers to comply is influenced by several factors, both internally and externally. This research seeks to determine MSME tax compliance through factors such as the digitalization of the tax system, the perspective of justice, and trust in authority.

This study used an associative quantitative approach with a purposive random sampling method. By applying the Slovin formula, the sample used amounted to 100 MSME actors who had filled out a research questionnaire on google forms. Previously, questionnaires that had passed the validity and reliability tests were distributed through social media for 30 days of observation. The data obtained were recapitulated for descriptive analysis and statistical analysis using the SmartPLS statistical program version 4.0.

The test results reflect that digitalization of the tax system, a fairness perspective, and trust in authority have a positive and significant influence on MSME compliance. The results of the study can be confirmed with the Slippery Slope Framework, which is formed from two elements, namely the roles of power and trust. The role of the tax authority's power is reflected in the policy to provide a digital-based service system (e-system). The transformation of the e-system provides unlimited services so as to drive the intention of taxpayers to utilize technology, which can be explained by the Technology of Acceptance Model Theory. Technology acceptance occurs when technology provides convenience and benefits to taxpayers. The role of the tax authority in the Slippery Slope Framework can be balanced or contribute to compliance if it is followed by taxpayer trust in the tax authorities. This is explained by Fairness Heuristic Theory. Trust is built when policies are fair. Fair policies further strengthen the legitimacy of tax authorities, which then encourage MSME compliance. This is supported by Legitimacy Theory. This research in the future is expected to be a consideration for using the e-system for MSMEs that have not used it. Then, this research is useful as evaluation material for reform efforts that have been implemented by the tax authorities.

Keywords: *digitalization, fairness, trust, awareness, tax compliance*

**DETERMINASI KEPATUHAN UMKM MELALUI DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PERSPEKTIF KEADILAN, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi Pada Program Studi Sarjana Terapan
Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI WAYAN ASRI YUNI SWARI
NIM : 1915644037**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Wayan Asri Yuni Swari

NIM : 1915644037

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Determinasi Kepatuhan UMKM Melalui Digitalisasi Sistem Perpajakan, Perspektif Keadilan, dan Kepercayaan Kepada Otoritas

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 06 Agustus 2023



Ni Wayan Asri Yuni Swari

SKRIPSI

DETERMINASI KEPATUHAN UMKM MELALUI DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, PERSPEKTIF KeadILAN, DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI WAYAN ASRI YUNI SWARI
NIM : 1915644037

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. I NYOMAN DARMAYASA, S.E., M.Ak., M.M., Ak.
NIP. 197709142005011002

DOSEN PEMBIMBING II



I MADE DWI JENDRA SULASTRA, S.Kom., M.T.
NIP. 197909112003121002

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA



I MADE SUDANA, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**DETERMINASI KEPATUHAN UMKM MELALUI DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PERSPEKTIF KEADILAN, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

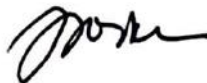


Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:



2. I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001



3. Anak Agung Putri Suardani, SE., M.M.
NIP. 196310261988032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinasi Kepatuhan UMKM Melalui Digitalisasi Sistem Perpajakan, Perspektif Keadilan, dan Kepercayaan Kepada Otoritas” secara baik dan tepat waktu. Esensi dari penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas tempat selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dengan baik selama masa studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan beragam ilmu kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah dan staf di Jurusan Akuntansi yang telah mengajarkan pengetahuan secara keilmuan dan etika berperilaku selama penulis melaksanakan studi di Politeknik Negeri Bali.
7. Keluarga dan sahabat yang telah bersedia menjadi tempat keluh dan kesah penulis serta memberikan dukungan kepada penulis selama proses studi dan penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Badung, 15 Juli 2023

Ni Wayan Asri Yuni Swari

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	1
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	21
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	23
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	38
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
B. Hasil Uji Hipotesis.....	65
C. Pembahasan.....	67
D. Keterbatasan Penelitian.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Implikasi.....	78
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Prov. Bali Tahun 2018-2022. 4	
Tabel 2.1 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	16
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respons	39
Tabel 4.1 Interval Kategori Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Digitalisasi Sistem Perpajakan	50
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Perspektif Keadilan.....	52
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Kepercayaan Kepada Otoritas	54
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Kepatuhan UMKM	56
Tabel 4.6 Nilai <i>Average Variance Extracted</i>	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Pendekatan <i>Fornell Larcker Criterion</i>	61
Tabel 4.8 Nilai Hasil Uji <i>Cross Loading</i>	62
Tabel 4.9 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	63
Tabel 4.10 Nilai <i>Path Coefficients</i>	64
Tabel 4.11 Nilai <i>R-square</i>	65
Tabel 4.12 Hasil <i>Predictive Relevance Test</i>	65
Tabel 4.13 Hasil Pengujian <i>Bootstrapping</i>	66



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	31
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	43
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	46
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha.....	46
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet.....	47
Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan KPP Domisili.....	47
Gambar 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Kebijakan NIK.....	48
Gambar 4.8 Model Diagram Jalur.....	58
Gambar 4.9 Model Sebelum Lolos Uji Validitas dan Reliabilitas.....	59
Gambar 4.10 Model Setelah Lolos Uji Validitas dan Reliabilitas	60



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Data
- Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 : Data Responden
- Lampiran 4 : Tabulasi Data Hasil Kuesioner
- Lampiran 5 : Hasil Uji Hipotesis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia tidak pernah terlepas atas kontribusi pajak (Inasius, 2019b). Lebih dari 70% pendapatan negara didominasi oleh sektor perpajakan yang didistribusikan untuk pembangunan nasional (Kemenkeu, 2022; OECD, 2022; Rahayu dan Adikara, 2022). Fungsi pajak yang sangat penting mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak setiap tahunnya. Akan tetapi, Laporan penerimaan pajak tahun 2021 merefleksikan rasio penerimaan pajak Indonesia berada pada level 10,1%. Level tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk pembangunan berkelanjutan, yakni sebesar 33,5%. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya, nilai tersebut memosisikan Indonesia pada peringkat ketiga terendah setelah negara Bhutan dan Laos (OECD, 2022).

Rasio penerimaan pajak yang tidak optimal menjadi catatan kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam tugasnya menghimpun penerimaan negara. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk memberikan upaya yang optimal, termasuk dari pihak wajib pajak. Salah satunya adalah dukungan wajib pajak yang berasal dari sektor krusial, yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini ditinjau dari jumlah UMKM di Indonesia yang menunjukkan peluang untuk memaksimalkan nilai penerimaan pajak (Hargiyanti et al., 2022; Pratiwi dan Somantri, 2021).

Wajib pajak UMKM ini berpotensi menjembatani peningkatan rasio penerimaan pajak, sebab wajib pajak UMKM menjadi sektor bisnis yang tengah berkembang secara signifikan saat ini (Edy et al., 2021). Namun di sisi lain, wajib pajak UMKM juga sangat rentan untuk tidak patuh (Pertiwi et al., 2020). Sehingga hal tersebut menjadi momentum bagi otoritas pajak guna menggali potensi pajak dari sektor UMKM melalui berbagai upaya reformasi perpajakan.

DJP selaku otoritas pajak melakukan reformasi perpajakan sebagai representasi komitmen terbaiknya dalam meningkatkan pelayanan (Ramadhani dan Sitorus, 2022). Didahului oleh penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 yang selanjutnya disebut dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai titik awal transformasi ke *self assesment system*. Kemudian diiringi oleh berbagai reformasi dari modernisasi administrasi perpajakan, *sunset policy*, sensus pajak nasional, *reinventing policy*, *tax amnesty*, *omnibus law*, hingga lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang diikuti oleh PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagai pengganti PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM dengan harapan dapat mencapai sasaran strategis DJP untuk meningkatkan penerimaan negara (DJP, 2021a).

Pertumbuhan rasio penerimaan pajak erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan pajak (Ige et al., 2023). Sementara itu, kepatuhan pajak menjadi persoalan pelik yang selalu timbul bagi setiap negara di dunia, terutama negara berkembang (Umar et al., 2019). Termasuk Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal (Inasius, 2019a). Permasalahan kepatuhan

pajak lahir bersama pemungutan pajak itu sendiri dan hampir tidak bisa dipisahkan. Kepatuhan pajak di Indonesia dalam hal kepatuhan formal selama 5 (lima) tahun terakhir dijabarkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Penerimaan Pajak (Triliun)	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
2018	42.479.485	Rp1.313,32	71,10%
2019	45.950.440	Rp1.332,66	73,06%
2020	46.380.119	Rp1.072,11	77,63%
2021	49.820.467	Rp1.278,65	84,07%
2022	66.351.573	Rp1.634,44	83,20%

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak, diolah peneliti tahun 2023

Terjadi fluktuasi pada perkembangan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang direpresentasikan oleh Tabel 1.1. Namun, tingkat kepatuhan tersebut hanya merujuk pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar. Apabila disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (2022), secara demografi jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2022 hanya mencapai 50% dari jumlah penduduk yang telah bekerja, yakni 135.297 juta jiwa. Hal ini merepresentasikan kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih perlu untuk ditingkatkan.

UMKM dapat berbentuk usaha pribadi ataupun badan hukum, sehingga statistik kepatuhan UMKM sulit untuk diperoleh. Selain itu, belum terdapat Undang-Undang Perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai UMKM. Oleh sebab itu, untuk dapat mendeteksi kepatuhan UMKM khususnya daerah Provinsi Bali, maka dapat ditinjau lebih lanjut dari jumlah wajib pajak yang

memanfaatkan tarif final 0,5% pada PP 23 Tahun 2018 atau PP 55 Tahun 2022.

Tingkat kepatuhan UMKM disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Prov. Bali Tahun 2018-2022

Tahun Pajak	Wajib Pajak UMKM Pengguna Tarif Final 0,5%	Wajib Pajak UMKM yang Telah Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
2018	50.691	44.102	87%
2019	65.828	54.741	83%
2020	71.326	50.220	70%
2021	72.886	54.819	75%
2022	73.014	62.037	85%

Sumber: Kanwil. Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, diolah peneliti tahun 2023

Kepatuhan pajak UMKM di Bali sesuai dengan Tabel 1.2 berangsur pulih pasca pandemi. Hal ini merupakan kabar yang baik, sebab kesuksesan dari *self assesment system* yang diterapkan di Indonesia sebagai sistem pemungutan pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Sarsadilla dan Usman, 2023). Adapun *Slippery Slope Framework* memprediksikan kepatuhan pajak selain dipengaruhi legitimasi kuasa, juga didominasi oleh kredibilitas otoritas yang memberikan keyakinan pada wajib pajak (Pereira et al., 2019). Sehingga penting bagi otoritas pajak dalam meningkatkan keyakinan wajib pajak demi menciptakan sinergi bagi kedua pihak.

Kolaborasi wajib pajak dengan otoritas terbentuk apabila terdapat hubungan yang baik yang tercermin dari kualitas layanan otoritas pajak (Ameliyaningsih dan Jannah, 2022). Oleh sebab itu, guna memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif, otoritas pajak memanfaatkan *internet of things* untuk melakukan transformasi sistem layanan secara digital (Hermawan, 2022). Adopsi teknologi ke dalam sistem layanan menarik sebagian besar minat wajib

pajak usaha kecil di berbagai negara (Gangodawilage et al., 2022). Penelitian Budiman et al. (2022) memvalidasi bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, di beberapa wilayah seperti Prianger Timur, sistem perpajakan digital belum mampu mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pratiwi dan Somantri, 2021).

Optimalisasi dengan reformasi perpajakan dilakukan tanpa meninggalkan aspek keadilan. Sebab, kesediaan wajib pajak untuk taat membayar pajak juga didorong oleh perspektif keadilan wajib pajak terhadap otoritas pajak (Rachmawan et al., 2020; Taing dan Chang, 2020). Berdasarkan pandangan Nguyen (2022), kesediaan wajib pajak menaati peraturan perpajakan terhambat oleh situasi negatif seperti kesulitan koordinasi dengan otoritas pajak atau tidak setaranya perilaku otoritas pajak di antara satu wajib pajak dengan yang lainnya. Sehingga hal ini dapat mencederai rasa keadilan wajib pajak secara prosedural.

Perspektif keadilan dapat disegmentasikan secara distributif, retributif, dan prosedural. Secara retributif, Farrar dan King (2022) menjumpai kepatuhan pajak di Kanada mengalami peningkatan setelah publik mengetahui pelaku penggelapan pajak diberikan hukuman atas perbuatannya. Sementara itu, di Nigeria, kombinasi antara keadilan distributif, prosedural, dan retributif relatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan (Alawode dan Adegbe, 2022). Meskipun Setiarini (2022) dalam penelitiannya tidak mencerminkan bahwa tingkat distribusi dana pajak untuk kesejahteraan umum dapat menjadi determinan dari kepatuhan pajak.

Perspektif keadilan dan manfaat pelayanan yang tidak optimal terhadap kesediaan wajib pajak untuk patuh dapat disebabkan oleh faktor kepercayaan afektif. Hal ini merujuk pada terus bertambahnya catatan merah otoritas pajak dalam beberapa tahun terakhir. Kian meningkatnya masalah penggelapan dana oleh otoritas, disusul dengan kompleksitasnya kisruh permasalahan pribadi oknum otoritas pajak yang kemudian mengungkapkan kepada publik bahwa otoritas pajak sendiri belum mencerminkan perilaku patuh pajak. Dengan berbagai permasalahan tersebut berimplikasi kepada moral wajib pajak yang membentuk ketidakpercayaan kepada otoritas (Jahnke dan Weisser, 2019).

Kredibilitas menjadi hal utama guna mengurangi persepsi negatif wajib pajak yang selama ini menjadi tantangan terbesar otoritas untuk mengoptimalkan kebijakan strategis yang ditetapkan (Abdu dan Adem, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Cahyonowati et al. (2023) dan Ige et al. (2023) pada penelitiannya memperoleh dilema kepatuhan pajak dapat diatasi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Akan tetapi, Francis (2019) mengkaji tingkat keyakinan kepada otoritas tidak memberikan implikasi yang signifikan atas kepatuhan pajak secara jangka panjang.

Hasil penelitian terdahulu yang tidak selaras menggambarkan akurasi digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas dalam memengaruhi niat kepatuhan wajib pajak masih lemah. Sedangkan kepatuhan pajak menjadi syarat keberhasilan *self assesment system* guna mengumpulkan pendapatan pajak. Aspek pelayanan dan kepercayaan adalah hal penting untuk menarik kesediaan wajib pajak untuk patuh. Namun,

kepercayaan wajib pajak berpotensi meredup akibat hadirnya berbagai masalah pada pemangku kepentingan. Di samping itu, penelitian mengenai perspektif keadilan distributif, prosedural, dan retributif terhadap kepatuhan pajak cenderung dilakukan di luar Indonesia. Perbedaan budaya di Indonesia dengan negara luar relatif menghasilkan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Sehingga hendaknya dilakukan pengkajian kembali terkait faktor-faktor tersebut. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi bukti empiris terkait determinan dari kepatuhan UMKM di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Urgensi tingkat kepatuhan dan ketidakpastian hasil penelitian pendahulu yang telah diuraikan pada latar belakang menjadikan peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh perspektif keadilan terhadap kepatuhan UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan UMKM?

C. Batasan Masalah

Guna menjaga penelitian terfokus sesuai rencana awal penelitian, maka ditetapkan suatu batasan ruang dan waktu penelitian. Dalam konteks ruang, penelitian difokuskan pada UMKM yang teregistrasi sebagai wajib pajak di Provinsi Bali. Peneliti juga memusatkan penelitian pada faktor digitalisasi

sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. Guna menguji pengaruh dari digitalisasi sistem perpajakan, maka penelitian dilakukan pada UMKM yang telah memanfaatkan fitur layanan *e-system*. Kemudian dalam konteks batasan waktu, penelitian terfokus pada pelaku UMKM yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022. Hal ini juga sebagai salah satu indikator wajib pajak tersebut telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Besarnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan nasional mendorong berbagai upaya otoritas untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan guna mengoptimalkan pendapatan negara. Secara garis besar, esensi dari penulisan penelitian ini adalah sebagai sumbangsih empiris dari faktor ekonomis dan non ekonomis yang dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Lebih spesifiknya, penelitian ini diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan UMKM.
- b. Guna mengetahui pengaruh perspektif keadilan terhadap kepatuhan UMKM.
- c. Guna mengetahui pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan UMKM.

2. Manfaat Penelitian

a. Wajib Pajak UMKM

Derasnya modernisasi menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan segala perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi yang terjadi pada sistem perpajakan saat ini memerlukan pemahaman dari wajib pajak UMKM terhadap *e-system*. Untuk itu penelitian ini dapat menjadi referensi literatur bagi UMKM mengenai urgensi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak termasuk aspek penyebabnya, yaitu sistem perpajakan digital, kepercayaan kepada otoritas dan perspektif keadilan pelaku UMKM. Sehingga ke depannya pemanfaatan sistem perpajakan digital dapat dilakukan UMKM secara maksimal guna efisiensi dan efektivitas aktivitas perpajakan.

b. Otoritas Pajak

Telah diungkapkan bahwa pajak memiliki manfaat yang besar bagi suatu negara dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sasaran strategis DJP selaku otoritas pajak. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan memiliki peran esensial dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Demikian juga dengan penelitian ini yang diharapkan untuk dapat memproyeksikan bagaimana digitalisasi sistem perpajakan, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan keadilan perpajakan sebagai determinan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Sehingga dapat menjadi evaluasi bagi otoritas pajak dalam

meningkatkan kinerja, layanan, transformasi dan/ atau penetapan kebijakan sistem perpajakan modern.

c. Politeknik Negeri Bali

Peralihan *supply driven* menjadi *demand driven* dilakukan dunia pendidikan akibat kesenjangan kompetensi lulusan dengan permintaan dunia industri. Sebagaimana ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2014 mengenai Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori perpajakan. Kemudian penetapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan harapan terbentuk sinergitas antara lembaga pendidikan dan dunia industri.

Program *pentahelix* yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali bagi mahasiswa semester akhir dikenal dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan melaksanakan PKL selama tiga bulan, mahasiswa dihadapkan pada realitas dunia industri. Oleh sebab itu, relevansi dari pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi pengembangan dan penyempurnaan materi perkuliahan di bidang perpajakan untuk mendukung kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan PKL dan ketika telah menyelesaikan studi. Selain itu, penelitian ini berkontribusi secara konseptual bagi peneliti berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan program statistik untuk menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, perspektif keadilan, dan kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan UMKM yang teregistrasi sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di bawah lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali. Berdasarkan hasil uji, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Variabel digitalisasi sistem perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Sebagai salah satu upaya dalam reformasi perpajakan, otoritas pajak berikhtiar untuk menemukan cara yang efisien dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Derasnya perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk melaksanakan digitalisasi pada sistem perpajakan yang dikenal dengan istilah *e-system*. Hadirnya *e-system* memberikan motivasi kepada UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagian besar wajib pajak menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi. Sebab pelaksanaan dapat dilakukan dari tempat mana pun dengan catatan memiliki koneksi internet. Namun, masih terdapat beberapa UMKM yang memiliki kendala pemahaman terkait *e-system* sehingga merasa pelaporan secara manual jauh lebih efisien. Hal ini

sejalan dengan *Technology of Acceptance Model Theory* mengenai aspek kemudahan dan kebermanfaatan sebagai syarat dari adaptasi teknologi.

2. Hubungan variabel perspektif keadilan dengan kepatuhan UMKM memroyeksikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Meskipun keadilan tidak bisa diterapkan secara keseluruhan bagi wajib pajak. Namun, keadilan perpajakan adalah keadilan bagi sebagian besar wajib pajak. Konsep keadilan ini bisa dijelaskan melalui *Fairness Heuristic Theory*. Dalam *Fairness Heuristic Theory*, peran kuasa otoritas pajak dibutuhkan sebagai fondasi dalam membangun kepatuhan pajak. Wajib pajak menilai ketegasan otoritas pajak dalam menindaklanjuti pelaku yang melanggar hukum pajak sangat diperlukan agar tidak memengaruhi wajib pajak yang lain untuk tidak patuh. Namun keadilan yang dimaksudkan tidak hanya terkait evaluasi perilaku wajib pajak, tetapi juga didasari atas bagaimana kebijakan yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan. Ketika otoritas pajak tidak dapat mengembangkan keduanya, maka berdasarkan *Slippery Slope Framework*, tingkat kepatuhan pajak akan turun tergelincir ke level tidak patuh.
3. Variabel kepercayaan kepada otoritas memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Otoritas pajak memiliki legitimasi untuk menyusun kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan yang dapat dijelaskan dengan *Legitimacy Theory*. Dalam *Legitimacy Theory*, rasa percaya sebagai salah satu determinan kepatuhan. Kepatuhan pajak menjadi tantangan yang dihadapi otoritas

pajak, begitu pun kredibilitas dari otoritas pajak itu sendiri. Sekalipun otoritas pajak dihadapkan dengan oknum otoritas yang tidak patuh, otoritas pajak harus tetap mempertahankan kredibilitasnya. Sebab pilar utama dari kepatuhan pajak berdasarkan *Slippery Slope Framework* adalah rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hal ini divalidasi oleh hasil rekapitulasi kuesioner yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak menyatakan enggan untuk memenuhi kewajibannya apabila dana pajak digunakan secara tidak bijaksana oleh otoritas pajak.

B. Implikasi

1. Implikasi praktis UMKM

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi wajib pajak UMKM untuk memahami mengenai urgensi dari penerimaan pajak termasuk determinan kepatuhan pajak. Digitalisasi membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih mudah untuk diakses. Wajib pajak UMKM diharapkan dapat memanfaatkan sistem layanan perpajakan secara digital yang telah disiapkan oleh otoritas pajak. Bagi wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan sistem pelayanan perpajakan digital dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk beralih dari layanan konvensional.

2. Implikasi praktis otoritas pajak

Penelitian ini memiliki kontribusi bagi otoritas pajak sebagai bahan evaluasi atas setiap kebijakan perpajakan yang ditetapkan. Otoritas pajak dapat menggunakan penelitian ini untuk menimbang seberapa besar antusiasme dan pemahaman wajib pajak dalam menerapkan layanan

perpajakan secara digital. Sehingga otoritas pajak diharapkan mengembangkan sistem tersebut hingga dapat dijangkau oleh wajib pajak yang belum memanfaatkan. Penelitian ini juga memverifikasi terkait peran kuasa dan kredibilitas otoritas pajak sangat memengaruhi keputusan wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, otoritas pajak diharapkan untuk mempertimbangkan cara membangun citra yang positif dan membentuk iklim yang sinergis dengan wajib pajak.

C. Saran

Kepatuhan pajak tidak dapat tercipta apabila belum terdapat kerja sama dari pihak otoritas dan wajib pajak. Sinergitas di antara keduanya sangat diperlukan untuk menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Berdasarkan serangkaian hasil dan pembahasan, serta limitasi yang dimiliki oleh penelitian ini dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sistem perpajakan digital direkomendasikan untuk mempertimbangkan pilihan untuk memanfaatkan layanan perpajakan digital. Adopsi teknologi dalam layanan perpajakan sebaiknya dimanfaatkan karena sangat praktis. Selain itu, hal ini selaras dengan prinsip *green accounting* yakni mengurangi penggunaan kertas dalam proses administrasi pajak. Sementara itu wajib pajak UMKM yang telah memanfaatkan layanan perpajakan digital direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan secara pengetahuan

perpajakan dan juga penggunaan teknologi guna meminimalkan kendala teknis yang kemungkinan dihadapi. Namun, apabila terdapat kendala yang serius, wajib pajak dapat menggunakan layanan pengaduan untuk memperoleh solusi.

2. Bagi Otoritas Pajak

Merujuk pada manfaat digitalisasi sistem perpajakan, otoritas pajak diharapkan dapat membujuk wajib pajak yang belum memanfaatkan layanan perpajakan digital dan wajib pajak yang masih memiliki kendala pemahaman dengan melangsungkan sosialisasi maupun pelatihan. Otoritas pajak juga diharapkan dapat memberikan ketegasan dalam menindak lanjuti pelaku yang melakukan kecurangan dalam administrasi perpajakan. Begitu pun dengan hadirnya berbagai isu tidak patuh pajak yang dilakukan oleh oknum otoritas dan berpotensi mendiskreditkan kredibilitas otoritas pajak. Otoritas pajak diharapkan dapat melakukan langkah mitigasi untuk mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan audit internal secara berkala dan konsisten serta menindak tegas pelaku kecurangan. Dengan demikian, otoritas pajak dapat membuktikan komitmennya dalam menjunjung keadilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan selama proses penelitian. Sehingga diperlukan pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan UMKM hingga pada

klasifikasi usaha menengah. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji kembali terkait determinan kepatuhan UMKM dengan mengembangkan variabel-variabel penelitian, menambah jumlah sampel, hingga memperluas tempat dilakukannya penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia : A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Al-Rahamneh, N. M., & Bidin, Z. (2022). The Effect of Tax Fairness, Peer Influence, and Moral Obligation on Sales Tax Evasion among Jordanian SMEs. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm15090407>
- Al-Yaqoobi, N. S. S., & Tan, M. I. B. I. (2021). the Technology Acceptance Model Theory and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Utaut). *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences*, VII(21), 645–653. <http://ijasos.ocerintjournals.org645>
- Alawode, O., & Adegbe, F. F. (2022). Taxpayers Behaviour and Tax Compliance Outcomes: Function of Tax Justice in Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 10(5), 91–115. <https://doi.org/10.37745/ejaaf.2013/vol10n5pp91115>
- Ameliyaningsih, T., & Jannah, L. (2022). Pengaruh Attitude Towards Electronic Tax System, Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Info Artha*, 6(2), 118–125.
- Ardhianto, R. A., Bawono, I. R., & Sudiby, A. (2022). The Role of Trust in The Voluntary Compliance of MSME Taxpayers. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.18501>
- Augustine, A., Ayodele, L., & Babatunde, A. (2022). Trust Relationship and Tax Compliance in Developing Countries-Informal Sector Perspectives. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, X(6), 309–332. <http://ijecm.co.uk/>
- Batrancea, L. M., Kudla, J., Blaszcak, B., & Kopyt, M. (2022). Differences in tax evasion attitudes between students and entrepreneurs under the slippery slope framework. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 200, 464–482. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.06.017>
- BPS, B. P. S. (2022). *Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>
- Brata, F. W., & Riandoko, R. (2020). Increasing Tax Compliance Through Trust and Power: Empirical Study of Slippery Slope Framework in ASEAN. *Scientax*, 2(1), 27–38.
- Budiman, N. A., Nurkamid, M., Sriyana, J., & Akhsyim. (2022). MSME Tax Compliance During the COVID-19 Pandemic in 4th International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE). *KnE Social Sciences*, 297–312. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i14.11980>

- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The Role of Social Norms and Trust in Authority in Tax Compliance Dilemmas. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Chang, H. J., Wu, C. H., Ho, J. F., & Chen, P. Y. (2008). on Sample Size in Using Central Limit Theorem for Gamma Distribution. *International Journal of Information and Management Sciences*, 19(1), 153–174.
- Chyung, S. Y. (Yonnie), Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on the Likert Scale. *Performance Improvement*, 56(9), 15–23. <https://doi.org/10.1002/pfi.21727>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan: Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan 2021*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2021>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Farrar, J., & King, T. (2022). To Punish or Not to Punish? The Impact of Tax Fraud Punishment on Observers' Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05061-w>
- Francis, O. (2019). The influence of tax amnesty programme on tax compliance in Nigeria: The moderating role of political trust. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(7), 120–129. <https://doi.org/10.5897/jat2019.0349>

- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Gangodawilage, D., Aluthge, C., & Madurapperuma, W. (2021). Use of Technology to Manage Tax Compliance Behavior of Entrepreneurs in the Digital Economy. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 11(3), 366–371. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.03.2021.p11150>
- Gangodawilage, D., Madurapperuma, W., & Aluthge, C. (2022). Tax Compliance Behavior of Micro-Multinational Enterprises (mMNEs). *International Journal of Innovation in Management Economics and Social Science*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.52547/ijimes.2.1.25>
- Gobena, L. B. (2021). Bayissa, Gobena, How Fairness Perceptions Affect Tax Compliance: The Effect of Procedural × Distributive Justice Interaction on Intention to Pay Taxes. *SSRN*, 1–53. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3986114>
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In *Sage*.
- Hansa, & Sahu, P. (2021). Fairness dimension of goods and services tax : Evidence from Indian MSMEs. *International Journal of Accounting, Business and Finance*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.55429/ijabf.v1i1.19>
- Hargiyanti, D., Herianti, E., & Marundha, A. (2022). Determinant Taxpayers Compliance among Micro , Small , and Medium- Scale Enterprises In Jakarta , Indonesia. *Journal of Governance Risk Management Compliance and Sustainability (JGRCS)*, 2(1), 10–24. <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v2i1.862>
- Hasanah, U., Waruwu, K., Tjut, U., Dhien, N., & Korespondensi, P. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Hassan, I. e, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary Tax compliance Behavior of Individual Taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Hermawan, P. (2022). A Study of Trust Base Voluntary Tax Compliance through Tax Administration Digital Transformation in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(08). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i8-53>

- Ige, A. G., Igbekoyi, O. E. P., & Dagunduro, M. E. (2023). Good Governance and Tax Compliance among SMEs in Nigeria: A Moderating Role of Socio-economic Factors. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 7(2), 69–92. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2022.61407>
- Inasius, F. (2019a). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Inasius, F. (2019b). Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia. *Advances in Taxation*, 26, 99–111. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720190000026006>
- Irawati, W., Mustaqim, & Barly, H. (2021). Application of Modern Tax Administration System on The Effectiveness of Tax Reception with Tax Sanctions as Moderating Variables. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(2), 122–128. <https://doi.org/10.47090/povraa.v2i2.124>
- Jahnke, B., & Weisser, R. A. (2019). How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa? *European Journal of Political Economy*, 60(September 2017). <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.09.003>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Pendapatan Kemenkeu Triwulan III 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732–739. <https://doi.org/10.31933/DIJMS>
- Lind, E. A., Kulik, C. T., Ambrose, M., & de Vera Park, M. V. (1993). Individual and Corporate Dispute Resolution: Using Procedural Fairness as a Decision Heuristic. *Administrative Science Quarterly*, 38(2), 224. <https://doi.org/10.2307/2393412>
- Mardhiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2019). The Slippery Slope Framework: Extending the Analysis by Investigating Factors Affecting Trust and Power. *CESifo Working Paper No. 7494*, February. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3338850>
- Muslim, A. (2022). Maximizing the Indonesian’s Tax Revenue From Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs) Sector. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 228–238. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v18i2.533>

- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Naing, N. N. (2003). Determination of Sample Size. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 10(2), 84–86.
- Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior : A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, 10(8), 179. <https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- OECD. (2022). *Tax-to-GDP ratio* (Issue 28). <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Okafor, O. N. (2022). Shaming of Tax Evaders: Empirical Evidence on Perceptions of Retributive Justice and Tax Compliance Intentions. *Journal of Business Ethics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-05011-y>
- Okpeyo, E. T., Musah, A., & Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana : The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.935>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 23 Tahun 2018.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Pereira, F., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance : The Slippery Slope Framework in The Brazilian Context. In *International Review of Economics* (Vol. 66, Issue 2). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of Fairness and Knowledge on Tax Compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>
- Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization of Tax Administration , Human Integrity and Taxpayer Compliance in East Preanger. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(1), 243–253. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1151>

- Putra, R. J., & Deri. (2022). The Effect of Moral Liability , the Effectiveness of Tax Socialization , Aspects of Tax Law Enforcement and The Digitalization of Tax Services on Taxpayer Compliance with Nationalism as A Moderation Variable. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 19237–19248. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5935.19237>
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The effect of tax knowledge on relationship of procedural justice perception towards voluntary tax compliance mediated by trust. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(4), 207–213. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.725>
- Rahayu, S., & Adikara, M. F. A. (2022). Effect of the Imposition of Sanctions , Fiscus Services & Morality Tax Services to Tax Compliance in 2021 (Empirical Study of Corporate Taxpayers in Bogor Regency of West Java). *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(03), 617–624. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i3-02>
- Ramadhani, S., & Sitorus, R. R. (2022). Tax Digitalization and Tax Service Quality's Effects on Taxpayer Obligation During the Pandemic Era. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(4), 443–450. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i4.95>
- Ramli, K., Nordin, N. K., Hamdan, N. A., & Lutfi, N. I. A. (2020). Tax Compliance: Taxpayers' View (Perception). *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(4), 189–200. www.economicshelp.org
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansibentu*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Saeed, S., Zubair, Z. A., & Khan, A. (2020). Voluntary Tax Compliance and the Slippery Slope Framework. *Volume and Issues Obtainable at Center for Sustainability Research and Consultancy Journal*, 6(2), 571–582. <https://doi.org/10.26710/jafee.v6i2.1253>
- Sarsadilla, V., & Usman, F. (2023). Review of Personal Taxpayer ' s Compliance Level with Slippery Slope Framework Approach. *European Journal of Business and Management Research*, 8(1), 231–235. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.1.1764>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Setiarini, S. I., Budiman, N. A., & Wijayani, D. R. (2022). The Effect of Modern Tax Administration System, Taxpayer Satisfaction, Enforcement of Tax Sanctions and Distributive Justice on Taxpayer Compliance (Study On Taxpayers of Personal Persons Registered at The Holy Tax Service Office).

- Economic: Journal Economic and Business*, 1(1), 27–33. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v1i1.241>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned Behavior Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., & Bidin, Z. (2019). Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Developing Countries: The Mediating Role of Socioeconomic Conditions. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 338–351. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Cipta Kerja. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan_UU_Nomor_7_Tahun_2021.pdf
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework.” *Law and Policy*, 32(4), 383–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00327.x>
- Wijaya, S., & Effendi, A. S. (2020). Analysis of Determinants of MSME Tax Compliance in Indonesia (Case-study in Working Areas of Pondok Aren Tax Office). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1252–1267.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory : An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yuniarti, E., Rachman, A. A., Dewi, D. N., & Kurniawan, H. (2022). The Effect of Tax Penalty, Perceptions of Fairness, And Tax Knowledge on Tax Compliance on MSME Taxpayers in Agricultural Sector. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*, 05(12), 57–63. www.ijlrhss.com
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>